

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya peningkatan mutu pendidikan disekolah perlu didukung kemampuan manajerial Kepala Sekolah. Kepala Sekolah hendaknya berupaya untuk mengatur sumber-sumber keuangan, baik pengeluaran maupun pendapatan biaya, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal.¹ Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian pula dilembaga pendidikan Islam. Soal-soal yang menyangkut keuangan di sekolah pada garis besarnya berkisar pada: Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) gaji guru, biaya pemeliharaan, dan keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana dan prasarana.²

Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit baik yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, efisiensi, efektifitas penyelenggaraan sistem persekolahan dan transparansi pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan professional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu sumber daya yang perlu di kelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah keuangan. Dalam konteks ini, keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan sekolah sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pembelajaran dilembaga pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, layanan dan pelaksanaan program supervisi. Oleh karena itu, Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah harus mengetahui dan mampu mengelola

¹ Abin Syamsudin Makmun, *Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip Dan Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah Dan Madrasah*, (Bandung: Pustaka Educa, 2010) hlm. 57

² Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004) hlm. 131

keuangan sekolah dengan baik, bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat serta pemerintah.³

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi disubstansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian dikarenakan pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat terlepas dari masalah biaya.⁴ E.Mulyasa berpendapat bahwa; masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah karena seluruh kegiatan pendidikan disekolah erat kaitannya dengan manajemen keuangan sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya, masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak. Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan (mengelola keuangan), mengevaluasi serta mempertanggung jawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.⁵

Dengan diberlakukannya otonomi daerah (desentralisasi) yang ditempuh oleh pemerintah daerah akan meningkatkan pemberdayaan pendidikan, termasuk

³ Sukistrtyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm. 129-130

⁴ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2005) hlm. 23

⁵ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), hlm, 193-194

dalam penganggaran pendidikan. Pemerintah daerah diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan, mulai dari tahap perumusan kebijakan pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Melalui desentralisasi pengelolaan pendidikan akan dapat menghadirkan sekolah sebagai suatu lembaga yang memiliki otoritas dan kewenangan yang tidak lagi tergantung kepada kebijakan dan birokrasi pendidikan yang sentralistik. Sekolah akan mampu secara mandiri meningkatkan kinerjanya untuk memajukan sistem pendidikannya dengan menggali, memanfaatkan dan mengalokasikan berbagai potensi sumber daya yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam kerangka inilah sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berperan sangat dominan dalam sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pendidikan menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam pengelolaannya kepada sekolah.⁶ Dalam hal ini, Kepala Sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pertanggung jawaban dan transparansi keuangan sekolah. Hal ini juga disebutkan dalam Undang-undang No 20 Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa: Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.⁷

Transparansi, akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan partisipasi. Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Dengan adanya informasi yang terbuka maka akan memudahkan kontrol sosial dari masyarakat. Akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggung jawaban suatu lembaga kepada

⁶ Khoirul Umam, "*Mempertegas Otonomi Pendidikan; Menuju Masyarakat Edukatif*" <http://re-searchengines.com/trimo10708.html>, hlm. 3, 12 November 2010 02:09 PM

⁷ Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Citra Umbara, 2003) hlm. 9

publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi atau tugas yang telah diembannya. Partisipasi dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan setiap daur pembangunan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga masyarakat bukan penerima manfaat melainkan sebagai agen pembangunan.⁸

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBM) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.⁹

⁸ Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rosda 2004) hlm. 28

⁹ Akhmad Sudrajat, "*Konsep Dasar Manajemen Keuangan Sekolah*" <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/18/konsep-dasar-manajemen-keuangan-sekolah/>, hlm 1-2, 12 November 2010 11:23 PM

MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan adalah lembaga pendidikan yang di dirikan oleh masyarakat. Sumber pendapatan dana di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan meliputi:

1. Masyarakat.

Dalam hal ini, masyarakat sekitar sangat berpartisipasi dalam pembangunan dan penyumbang dana di lembaga tersebut. Masyarakat memberikan bantuan berupa uang maupun barang. Pemberian sumbangan oleh masyarakat setiap setahun tiga kali ketika panen hasil pertanian. Pelaksanaan pemberian bantuan oleh masyarakat dilakukan setiap bulan desember, april dan agustus.

2. Pemerintah.

Dari pihak sekolah mengajukan proposal bantuan ke provinsi, kabupaten dan instansi pemerintah lain untuk mendapatkan bantuan dana operasional pendidikan.

3. Investasi Madrasah.

Madrasah memiliki investasi yang berupa lahan pertanian yaitu sawah. Sawah dikelola perorangan yang kemudian hasilnya di bagi antara pengelola sawah mendapatkan 50 % dan lembaga pendidikan MTs Salafuyah mendapatkan 50% dari hasil panen.

4. Orang tua siswa.

Orang tua siswa memberikan bantuan dana suka rela bagi anaknya yang akan lulus.

Yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimana MTs Salafiyah melaksanakan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasioanal No. 20 pasal 48 yang menyatakan bahwa: Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana transparansi pendapatan, pengeluaran, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengalokasian dana yang dikelola oleh lembaga pendidikan MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan. Supaya terciptanya kepercayaan masyarakat, pemerintah dan orang tua siswa kepada lembaga pendidikan MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan.

Berdasarkan penguraian dari latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul **”TRANSPARANSI MANAJEMEN KEUANGAN MADRASAH (Deskripsi di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan Tahun Pembelajaran 2010/2011)”**

B. Penegasan Istilah

Sebelum melanjutkan pembahasan, terlebih dahulu penulis ingin memberikan batasan-batasan istilah dalam judul skripsi ini, sehingga akan lebih mudah dalam memahami maksud, baik tersurat maupun tersirat. Dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan-penegasan istilah dari judul yang dimaksud, yaitu:

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan.¹⁰ Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan di lembaga pendidikan.

2. Manajemen keuangan

Secara etimologis, Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata kerja *to manage* yang disinonimkan dengan *to hand* yang berarti mengurus, *to control* memeriksa, *to guide* memimpin. Apabila dilihat dari asal katanya, manajemen berarti pengurusan, pengendalian atau pembimbing.¹¹ Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif dan efisien maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.¹²

¹⁰ Pius A Partanto dan M. Dahlan al Barry , *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka,1994), hlm 759

¹¹ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010), hlm.77.

¹² R.Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*,(Yogyakarta; FE UGM, 2001),hlm. 6.

3. MTs Salafiyah

MTs Salafiyah adalah salah satu lembaga pendidikan islam swasta yang bercorak Islam memiliki kualitas terakreditasi B yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan belajar mengajar di daerah Kabupaten Grobogan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan transparansi manajemen keuangan yang berlaku di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan pada tahun pembelajaran 2010/2011?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transparansi manajemen keuangan yang berlaku di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan.

2. Manfaat Penelitian.

a) Manfaat Teoritis

- i. Menambah khasanah ilmiah bagi perpustakaan sebagai referensi atau rujukan tentang manajemen keuangan di lembaga pendidikan.
- ii. Sebagai bahan informasi di kalangan lembaga pendidikan tentang transparansi manajemen keuangan.

b) Manfaat Praktis

- i. Bagi MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan fokus perhatian studi ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan, bahan dokumentasi historis dan bahan pertimbangan untuk megambil langkah-langkah guna meningkatkan transparansi manajemen keuangan sekolah, mengingat sejauh ini persoalan transparansi manajemen keuangan sekolah yang umumnya masih kurang terbuka pada publik.
- ii. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga-lembaga lain, khususnya lembaga pendidikan Islam tentang transparansi manajemen keuangan.

E. Kajian Pustaka

Sebagai acuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kajian pustaka sebagai landasan berfikir, yang mana kajian pustaka yang penulis

gunakan adalah beberapa hasil penelitian skripsi. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya adalah:

1. Skripsi yang diangkat oleh saudara Muhlisin yang berjudul: Studi Tentang Manajemen Keuangan Madrasah di Madrasah Aliyah Futuhiyah 2 Mranggen Demak Tahun Pembelajaran 2005/2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen yang diterapkan Madrasah Aliyah Futuhiyah 2 Mranggen Demak sudah sesuai dengan fungsi dan manajemen pembiayaan pendidikan dalam ruang lingkup administrasi pendidikan.¹³ Hal tersebut terlihat tugas manajemen pembiayaan pendidikan yang diterapkan antara lain sebagai berikut: Penyusunan RAPBS, melaksanakan anggaran pembiayaan sekolah, mencatat pembukuan keuangan pengeluaran serta pemasukan dana dan mengevaluasi anggaran yang telah tertulis di RAPBS.
2. Skripsi yang diangkat oleh saudari Bidayatun Nikmah yang berjudul: Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi di Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati).¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati dapat dilihat pengalokasian dana RAPBM yaitu melalui pengalokasian dana untuk siswa berupa kegiatan ekstrakurikuler, pengalokasian dana untuk guru melalui peningkatan profesionalisme guru berupa gaji dan tunjangan, pengalokasian dana sarana dan prasarana yaitu dengan cara penambahan fasilitas, perbaikan sarana dan pemeliharaan.

Penulis sendiri mengangkat judul **“TRANSPARANSI MANAJEMEN KEUANGAN MADRASAH (Deskripsi di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan Tahun Pembelajaran 2010/2011)”** dengan harapan bahwa penulis akan memperoleh data-data tentang beberapa hal yang berkaitan dengan judul di atas yang meliputi: Pemasukan dan pengeluaran dana, penyusunan

¹³ Muhlisin, Skripsi *“Studi Tentang Manajemen Keuangan Madrasah Di Madrasah Aliyah Futuhiyah 2 Mranggen Demak Tahun Pembelajaran 2005/2006”* (Semarang: Perpustakaan IAIN Wali Songo Semarang, 2006)

¹⁴ Bidayatun Nikmah, Skripsi *“Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Di Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati)”* (Semarang: Perpustakaan IAIN Wali Songo Semarang, 2007)

RAPBS, laporan keuangan sekolah, investasi yang di miliki oleh sekolah dan pelaksanaan transparansi manajemen keuangan yang berlaku di MTs Salafiyah Mrisi tanggung Harjo Grobogan.

Hampir ada kesamaan antara skripsi penulis dengan skripsi saudara Muhlisin. Persamaanya terletak pada kesamaan meneliti materi manajemen keuangan yang terdapat di lembaga masing-masing yang diteliti. Perbedaanya adalah penulis berusaha menggali upaya pelaksanaan transparansi yang ada di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan meliputi: Pemasukan dan pengeluaran dana, penyusunan RAPBS, laporan keuangan sekolah, investasi yang di miliki oleh sekolah dan pelaksanaan transparansi manajemen keuangan yang berlaku di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.¹⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.¹⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan fenomenologis, dimana peneliti dengan menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Dalam hal ini menelusuri fenomena dan memperoleh data yang ada di lapangan sehubungan dengan transparansi manajemen keuangandi MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan.

¹⁵ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), cet. 21, hlm. 4.

¹⁶ Nana Syaodih Sumadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 72.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan terhadap bagaimana pelaksanaan transparansi manajemen keuangan sekolah yang beralaku di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan Tahun Pembelajaran 2010/2011.

3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁷ Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data peneliti mendapatkan dua jenis sumber data

- a. Sumber primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung.¹⁸

Sumber ini penulis dapatkan melalui dokumentasi arsip lembaga tentang RAPBM dan laporan keuangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada periode bulan oktober desember tahun anggaran 2010/2011.

- b. Sumber sekunder yaitu merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer.¹⁹

Sumber ini penulis dapatkan melalui wawancara dengan pihak sekolah yang dalam hal ini, komite sekolah, kepala sekolah dan bendahara sekolah.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- a. Wawancara atau interview.

Metode *Interview* atau Wawancara yaitu alat pengumpul data atau informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.²⁰ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang bagaimana pelaksanaan transparansi manajemen keuangan sekolah di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 129.

¹⁸ Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 91

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 92.

²⁰ Sanapiyah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh, 1990) hlm 80.

Grobogan Tahun Pembelajaran 2010/2011. Dalam hal ini, penulis mengadakan wawancara langsung dengan Komite Sekolah, Kepala Sekolah, dan bendahara sekolah.

b. Observasi atau pengamatan.

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian,²¹ Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung penyusunan RAPBM Tahun pembelajaran 2010/2011, investasi yang dimiliki madrasah serta pelaksanaan transparansi manajemen keuangan sekolah yang berlaku di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transparansi manajemen keuangan sekolah untuk membantu menganalisis data-data primer. Pelacakan dokumen dan arsip MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan diarahkan untuk mencari informasi tentang beberapa hal berikut:

a. Struktur Organisasi.

b. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah Tahun Ajaran 2010/2011.

c. Laporan Keuangan Sekolah pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada periode bulan Oktober - Desember Tahun Anggaran 2010/2011.

d. Pendapatan dana dan pengeluaran sekolah.

e. Pelaksanaan transparansi manajemen keuangan sekolah.

²¹ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), hlm. 16.

f. Sarana dan prasarana yang di miliki oleh sekolah.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis catatan hasil observasi, interview, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan.²² Sebagai peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif yang diarahkan pada tujuan tertentu yang telah ditetapkan lewat rumusan masalah, maka analisis data menggunakan metode induktif, yaitu metode berpikir dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat-sifat umum. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Setelah data diperoleh dari lapangan yang cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara telit dan rinci. Kemudian dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.²³ Dari reduksi data mendapatkan informasi antara lain: RAPBS, laporan keuangan, pemasukan dan pengeluaran dana di sekolah, investasi yang di miliki oleh sekolah dan pelaksanaan transparansi manajemen keuangan.

²² Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm. 104.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hlm. 92.

BAB I

PENDAHULUAN

G. Latar Belakang Masalah

Upaya peningkatan mutu pendidikan disekolah perlu didukung kemampuan manajerial Kepala Sekolah. Kepala Sekolah hendaknya berupaya untuk mengatur sumber-sumber keuangan, baik pengeluaran maupun pendapatan biaya, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal.²⁴ Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian pula dilembaga pendidikan Islam. Soal-soal yang menyangkut keuangan di sekolah pada garis besarnya berkisar pada: Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) gaji guru, biaya pemeliharaan, dan keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana dan prasarana.²⁵

Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit baik yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, efisiensi, efektifitas penyelenggaraan sistem persekolahan dan transparansi pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan professional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu sumber daya yang perlu di kelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah keuangan. Dalam konteks ini, keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan sekolah sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pembelajaran dilembaga pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, layanan dan pelaksanaan program supervisi. Oleh karena itu, Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah harus mengetahui dan mampu mengelola

²⁴ Abin Syamsudin Makmun, *Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip Dan Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah Dan Madrasah*, (Bandung: Pustaka Educa, 2010) hlm. 57

²⁵ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004) hlm. 131

keuangan sekolah dengan baik, bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat serta pemerintah.²⁶

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi disubstansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian dikarenakan pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat terlepas dari masalah biaya.²⁷ E.Mulyasa berpendapat bahwa; masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah karena seluruh kegiatan pendidikan disekolah erat kaitannya dengan manajemen keuangan sekolah. Meskipun tidak sepenuhnya, masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak. Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan (mengelola keuangan), mengevaluasi serta mempertanggung jawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.²⁸

Dengan diberlakukannya otonomi daerah (desentralisasi) yang ditempuh oleh pemerintah daerah akan meningkatkan pemberdayaan pendidikan, termasuk

²⁶ Sukistrtyiorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm. 129-130

²⁷ Nanang Fatah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2005) hlm. 23

²⁸ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), hlm, 193-194

dalam penganggaran pendidikan. Pemerintah daerah diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan, mulai dari tahap perumusan kebijakan pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Melalui desentralisasi pengelolaan pendidikan akan dapat menghadirkan sekolah sebagai suatu lembaga yang memiliki otoritas dan kewenangan yang tidak lagi tergantung kepada kebijakan dan birokrasi pendidikan yang sentralistik. Sekolah akan mampu secara mandiri meningkatkan kinerjanya untuk memajukan sistem pendidikannya dengan menggali, memanfaatkan dan mengalokasikan berbagai potensi sumber daya yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam kerangka inilah sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berperan sangat dominan dalam sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pendidikan menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam pengelolaannya kepada sekolah.²⁹ Dalam hal ini, Kepala Sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pertanggung jawaban dan transparansi keuangan sekolah. Hal ini juga disebutkan dalam Undang-undang No 20 Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa: Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.³⁰

Transparansi, akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan partisipasi. Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Dengan adanya informasi yang terbuka maka akan memudahkan kontrol sosial dari masyarakat. Akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggung jawaban suatu lembaga kepada

²⁹ Khoirul Umam, "*Mempertegas Otonomi Pendidikan; Menuju Masyarakat Edukatif*" <http://re-searchengines.com/trimo10708.html>, hlm. 3, 12 November 2010 02:09 PM

³⁰ Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Citra Umbara, 2003) hlm. 9

publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi atau tugas yang telah diembannya. Partisipasi dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan setiap daur pembangunan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga masyarakat bukan penerima manfaat melainkan sebagai agen pembangunan.³¹

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBM) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.³²

³¹ Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rosda 2004) hlm. 28

³² Akhmad Sudrajat, "*Konsep Dasar Manajemen Keuangan Sekolah*" <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/18/konsep-dasar-manajemen-keuangan-sekolah/>, hlm 1-2, 12 November 2010 11:23 PM

MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan adalah lembaga pendidikan yang di dirikan oleh masyarakat. Sumber pendapatan dana di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan meliputi:

5. Masyarakat.

Dalam hal ini, masyarakat sekitar sangat berpartisipasi dalam pembangunan dan penyumbang dana di lembaga tersebut. Masyarakat memberikan bantuan berupa uang maupun barang. Pemberian sumbangan oleh masyarakat setiap setahun tiga kali ketika panen hasil pertanian. Pelaksanaan pemberian bantuan oleh masyarakat dilakukan setiap bulan desember, april dan agustus.

6. Pemerintah.

Dari pihak sekolah mengajukan proposal bantuan ke provinsi, kabupaten dan instansi pemerintah lain untuk mendapatkan bantuan dana operasional pendidikan.

7. Investasi Madrasah.

Madrasah memiliki investasi yang berupa lahan pertanian yaitu sawah. Sawah dikelola perorangan yang kemudian hasilnya di bagi antara pengelola sawah mendapatkan 50 % dan lembaga pendidikan MTs Salafuyah mendapatkan 50% dari hasil panen.

8. Orang tua siswa.

Orang tua siswa memberikan bantuan dana suka rela bagi anaknya yang akan lulus.

Yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimana MTs Salafiyah melaksanakan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasioanal No. 20 pasal 48 yang menyatakan bahwa: Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana transparansi pendapatan, pengeluaran, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengalokasian dana yang dikelola oleh lembaga pendidikan MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan. Supaya terciptanya kepercayaan masyarakat, pemerintah dan orang tua siswa kepada lembaga pendidikan MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan.

Berdasarkan penguraian dari latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul **”TRANSPARANSI MANAJEMEN KEUANGAN MADRASAH (Deskripsi di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan Tahun Pembelajaran 2010/2011)”**

H. Penegasan Istilah

Sebelum melanjutkan pembahasan, terlebih dahulu penulis ingin memberikan batasan-batasan istilah dalam judul skripsi ini, sehingga akan lebih mudah dalam memahami maksud, baik tersurat maupun tersirat. Dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan-penegasan istilah dari judul yang dimaksud, yaitu:

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan.³³ Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan di lembaga pendidikan.

5. Manajemen keuangan

Secara etimologis, Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata kerja *to manage* yang disinonimkan dengan *to hand* yang berarti mengurus, *to control* memeriksa, *to guide* memimpin. Apabila dilihat dari asal katanya, manajemen berarti pengurusan, pengendalian atau pembimbing.³⁴ Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif dan efisien maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien.³⁵

³³ Pius A Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka,1994), hlm 759

³⁴ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010), hlm.77.

³⁵ R.Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*,(Yogyakarta; FE UGM, 2001),hlm. 6.

6. MTs Salafiyah

MTs Salafiyah adalah salah satu lembaga pendidikan islam swasta yang bercorak Islam memiliki kualitas terakreditasi B yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan belajar mengajar di daerah Kabupaten Grobogan.

I. Rumusan Masalah

2. Bagaimana pelaksanaan transparansi manajemen keuangan yang berlaku di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan pada tahun pembelajaran 2010/2011?

J. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transparansi manajemen keuangan yang berlaku di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan.

4. Manfaat Penelitian.

c) Manfaat Teoritis

- iii. Menambah khasanah ilmiah bagi perpustakaan sebagai referensi atau rujukan tentang manajemen keuangan di lembaga pendidikan.
- iv. Sebagai bahan informasi di kalangan lembaga pendidikan tentang transparansi manajemen keuangan.

d) Manfaat Praktis

- iii. Bagi MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan fokus perhatian studi ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan, bahan dokumentasi historis dan bahan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah guna meningkatkan transparansi manajemen keuangan sekolah, mengingat sejauh ini persoalan transparansi manajemen keuangan sekolah yang umumnya masih kurang terbuka pada publik.
- iv. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga-lembaga lain, khususnya lembaga pendidikan Islam tentang transparansi manajemen keuangan.

K. Kajian Pustaka

Sebagai acuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kajian pustaka sebagai landasan berfikir, yang mana kajian pustaka yang penulis

gunakan adalah beberapa hasil penelitian skripsi. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya adalah:

3. Skripsi yang diangkat oleh saudara Muhlisin yang berjudul: Studi Tentang Manajemen Keuangan Madrasah di Madrasah Aliyah Futuhiyah 2 Mranggen Demak Tahun Pembelajaran 2005/2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen yang diterapkan Madrasah Aliyah Futuhiyah 2 Mranggen Demak sudah sesuai dengan fungsi dan manajemen pembiayaan pendidikan dalam ruang lingkup administrasi pendidikan.³⁶ Hal tersebut terlihat tugas manajemen pembiayaan pendidikan yang diterapkan antara lain sebagai berikut: Penyusunan RAPBS, melaksanakan anggaran pembiayaan sekolah, mencatat pembukuan keuangan pengeluaran serta pemasukan dana dan mengevaluasi anggaran yang telah tertulis di RAPBS.
4. Skripsi yang diangkat oleh saudari Bidayatun Nikmah yang berjudul: Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi di Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati).³⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati dapat dilihat pengalokasian dana RAPBM yaitu melalui pengalokasian dana untuk siswa berupa kegiatan ekstrakurikuler, pengalokasian dana untuk guru melalui peningkatan profesionalisme guru berupa gaji dan tunjangan, pengalokasian dana sarana dan prasarana yaitu dengan cara penambahan fasilitas, perbaikan sarana dan pemeliharaan.

Penulis sendiri mengangkat judul **“TRANSPARANSI MANAJEMEN KEUANGAN MADRASAH (Deskripsi di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan Tahun Pembelajaran 2010/2011)”** dengan harapan bahwa penulis akan memperoleh data-data tentang beberapa hal yang berkaitan dengan judul di atas yang meliputi: Pemasukan dan pengeluaran dana, penyusunan

³⁶ Muhlisin, Skripsi *“Studi Tentang Manajemen Keuangan Madrasah Di Madrasah Aliyah Futuhiyah 2 Mranggen Demak Tahun Pembelajaran 2005/2006”* (Semarang: Perpustakaan IAIN Wali Songo Semarang, 2006)

³⁷ Bidayatun Nikmah, Skripsi *“Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Di Perguruan Islam Matholi'ul Falah Kajen Margoyoso Pati)”* (Semarang: Perpustakaan IAIN Wali Songo Semarang, 2007)

RAPBS, laporan keuangan sekolah, investasi yang di miliki oleh sekolah dan pelaksanaan transparansi manajemen keuangan yang berlaku di MTs Salafiyah Mrisi tanggung Harjo Grobogan.

Hampir ada kesamaan antara skripsi penulis dengan skripsi saudara Muhlisin. Persamaanya terletak pada kesamaan meneliti materi manajemen keuangan yang terdapat di lembaga masing-masing yang diteliti. Perbedaanya adalah penulis berusaha menggali upaya pelaksanaan transparansi yang ada di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan meliputi: Pemasukan dan pengeluaran dana, penyusunan RAPBS, laporan keuangan sekolah, investasi yang di miliki oleh sekolah dan pelaksanaan transparansi manajemen keuangan yang berlaku di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan.

L. Metode Penelitian

5. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.³⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.³⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan fenomenologis, dimana peneliti dengan menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Dalam hal ini menelusuri fenomena dan memperoleh data yang ada di lapangan sehubungan dengan transparansi manajemen keuangandi MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan.

³⁸ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), cet. 21, hlm. 4.

³⁹ Nana Syaodih Sumadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 72.

6. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan terhadap bagaimana pelaksanaan transparansi manajemen keuangan sekolah yang beralaku di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan Tahun Pembelajaran 2010/2011.

7. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁰ Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data peneliti mendapatkan dua jenis sumber data

- c. Sumber primer yaitu sumber yang diperoleh secara langsung.⁴¹

Sumber ini penulis dapatkan melalui dokumentasi arsip lembaga tentang RAPBM dan laporan keuangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada periode bulan oktober desember tahun anggaran 2010/2011.

- d. Sumber sekunder yaitu merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer.⁴²

Sumber ini penulis dapatkan melalui wawancara dengan pihak sekolah yang dalam hal ini, komite sekolah, kepala sekolah dan bendahara sekolah.

8. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- d. Wawancara atau interview.

Metode *Interview* atau Wawancara yaitu alat pengumpul data atau informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.⁴³ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang bagaimana pelaksanaan transparansi manajemen keuangan sekolah di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 129.

⁴¹ Saifudin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 91

⁴² *Ibid.*, hlm. 92.

⁴³ Sanapiyah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh, 1990) hlm 80.

Grobogan Tahun Pembelajaran 2010/2011. Dalam hal ini, penulis mengadakan wawancara langsung dengan Komite Sekolah, Kepala Sekolah, dan bendahara sekolah.

e. Observasi atau pengamatan.

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian,⁴⁴ Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung penyusunan RAPBM Tahun pembelajaran 2010/2011, investasi yang dimiliki madrasah serta pelaksanaan transparansi manajemen keuangan sekolah yang berlaku di MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan.

f. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transparansi manajemen keuangan sekolah untuk membantu menganalisis data-data primer. Pelacakan dokumen dan arsip MTs Salafiyah Mrisi Tanggung Harjo Grobogan diarahkan untuk mencari informasi tentang beberapa hal berikut:

g. Struktur Organisasi.

h. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah Tahun Ajaran 2010/2011.

i. Laporan Keuangan Sekolah pada penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada periode bulan Oktober - Desember Tahun Anggaran 2010/2011.

j. Pendapatan dana dan pengeluaran sekolah.

k. Pelaksanaan transparansi manajemen keuangan sekolah.

⁴⁴ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), hlm. 16.

1. Sarana dan prasarana yang di miliki oleh sekolah.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis catatan hasil observasi, interview, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang permasalahan yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan.⁴⁵ Sebagai peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif yang diarahkan pada tujuan tertentu yang telah ditetapkan lewat rumusan masalah, maka analisis data menggunakan metode induktif, yaitu metode berpikir dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat-sifat umum. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Dalam memberikan interpretasi data yang diperoleh, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Setelah data diperoleh dari lapangan yang cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara telit dan rinci. Kemudian dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.⁴⁶ Dari reduksi data mendapatkan informasi antara lain: RAPBS, laporan keuangan, pemasukan dan pengeluaran dana di sekolah, investasi yang di miliki oleh sekolah dan pelaksanaan transparansi manajemen keuangan.

⁴⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm. 104.

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hlm. 92.